



# RENJA 2023

**Badan Perencanaan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah  
Kabupaten Natuna  
2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia Nya sehingga Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 dapat tersusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolak ukur) kinerja kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, maka diharapkan dapat dijadikan dasar penyusunan anggaran oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna untuk Tahun 2023 dan melalui dokumen ini pula para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam adanya perencanaan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023.

Ranai, Juli 2022

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah  
Kabupaten Natuna



**MOESTOFA ALBAKRY, SE**  
NIP. 19731030 200012 1 003



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	: Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2021.....	10
Tabel 2.2	: Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.....	12
Tabel 3.1	: Tujuan dan Sasaran Tahun 2023.....	25
Tabel 3.2	: Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2023 BP3D Kabupaten Natuna.....	26

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
- Lampiran II : Cascading Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023
- Lampiran III : Cross Cutting Kinerja Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16). Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengendalian Daerah.

### b. Fungsi dan kewenangan

Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan pegkajian kebijakan daerah dan fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;
- g. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. Pelaksanaan pelayanan teknis dan administrative di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan penjabaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memberikan gambaran tentang program, kegiatan sub kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

#### **1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Persiapan Penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mencakup :

- 1) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tentang pembentukan tim penyusun Renja;
- 2) Orientasi mengenai Renja;
- 3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- 4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

#### **2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah**

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi :

- 1) Perumusan Rancangan Renja, dan
- 2) Penyajian Rancangan Renja.

Perumusan rancangan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mencakup :

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
- c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
- e) Perumusan tujuan dan sasaran;

- f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- g) Perumusan kegiatan prioritas;
- h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
- i) Penyempurnaan rancangan Renja;
- j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan
- k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

### **3. Forum Perangkat Daerah**

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dibahas, sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

### **4. Penetapan Renja SKPD**

Pada tahap ini, rancangan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan Renja Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2019 - 2024. Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 70 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 155);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2023 sebagai berikut:

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

#### **2. Tujuan**

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2023;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2023 sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2023, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2023
- Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 12,257,171,694 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9,504,280,200 atau sebesar 77,54%, dan realisasi fisik sebesar 143,87%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2021 dan capaian Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :

##### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
  - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
  - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

**c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
  - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
  - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
  - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
  - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
  - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

**d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
- 2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi
  - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Capaian renstra secara umum telah berjalan dengan baik, dengan capaian pada seluruh kegiatan telah mencapai 100 persen, bahkan sebagian diantaranya telah melebihi target kinerja maupun anggaran yang direncanakan dalam Renstra.
3. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada penyusunan Renja tahun 2023 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 terlihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra  
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2021

Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dewasuai		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dewasuai (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dewasuai (%)		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah			
				4.A	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100					
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K		Rp	K	Rp
<b>5.01. PERENCANAAN</b>																											
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	Persen	98	1,603,718,000	82.88	98	173,473,000	-	20,281,027	64,225,000	5,050,000	89.13	89,556,027	90.95	51.63	172	89,556,027	100.00	5.58							
2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	Persen	98	1,603,718,000	82.88	907,954,374	173,473,000	-	20,281,027	64,225,000	5,050,000	89.13	89,556,027	90.95	51.63	172	997,510,401	100.00	62.20							
01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Dokumen	10	1,603,718,000	8	907,954,374	2	173,473,000	0	0	20,281,027	2	64,225,000	0	5,050,000	2	89,556,027	100.00	51.63	10	997,510,401	100.00	62.20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat / Nilai Akuntabilitas	Nilai/ Predikat	A / 80	425,000,000	85.96	55,136,400	80	16,446,000	88.27	-	88.27	-	88.27	3,567,800	88.27	935,000	88.27	4,502,800	110.34	27.38	174	59,639,200	100.00	14.03		
2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat / Nilai Akuntabilitas	Nilai/ Predikat	A / 80	425,000,000	85.96	55,136,400	80	16,446,000	88.27	-	88.27	-	88.27	3,567,800	88.27	935,000	88.27	4,502,800	110.34	27.38	174	59,639,200	100.00	14.03		
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Historis Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	Laporan	15	425,000,000	12	55,136,400	3	16,446,000	1	-	3	0	3,567,800	0	935,000	4	4,502,800	133.33	27.38	16	59,639,200	106.67	14.03	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran	Bulan	60	410,000,000	48	292,150,000	12	8,080,279,654	3	1,563,352,407	3	2,181,974,033	3	1,942,261,696	2	1,905,312,271	11	7,592,900,406	91.67	93.97	39	7,883,050,406	98.33	1023.18		
2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran	Bulan	60	410,000,000	48	292,150,000	12	8,080,279,654	3	1,563,352,407	3	2,181,974,033	3	1,942,261,696	2	1,905,312,271	11	7,592,900,406	91.67	97.59	11	6,689,331,078	#DIV/0!	#DIV/0!		
01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	Orang	57	6,894,592,344	57	1,426,287,107	57	1,853,297,398	57	1,790,375,479	57	1,613,371,094	57	1,613,371,094	57	1,613,371,094	57	6,689,331,078	100.00	97.59	37	6,689,331,078	#DIV/0!	#DIV/0!		
2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran	Bulan	60	410,000,000	48	292,150,000	12	80,000,000	3	17,820,000	3	16,960,000	3	7,840,000	2	13,520,000	11	56,140,000	91.67	70.18	39	348,250,000	98.33	84.95		
02.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran	Bulan	60	410,000,000	48	292,150,000	12	80,000,000	3	17,820,000	3	16,960,000	3	7,840,000	2	13,520,000	11	56,140,000	91.67	70.18	39	348,250,000	98.33	84.95	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.04.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran	Bulan	60	1,882,000,000	48	3,645,234,241	12	583,522,410	3	17,768,300	3	189,195,135	3	33,337,714	2	144,091,644	11	384,392,795	91.67	65.67	59	1,023,627,030	98.33	214.11		
02.	Pemeliharaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan perlatan dan perengkapan kantor	Jenis	60	737,900,000	48	1,194,749,670	0	108,000,000	0	0	58,800,000	0	31,950,000	0	90,730,000	100.00	83.30	24	1,283,499,167	90.00						
03.	Pemeliharaan Perlatan Rumah Tanaga	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	60	42,000,000	48	30,026,000	12	12,000,000	3	3	2,500,000	3	2,500,000	2	0	11	5,000,000	91.67	41.67	39	35,026,000	98.33		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	Bulan	60	600,000,000	48	341,990,000	12	34,000,000	3	2,520,000	3	2,520,000	3	5,040,000	3	7,560,000	12	17,640,000	100.00	51.88	00	359,630,000	100.00		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
05.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan pengabdian	Bulan	60	400,000,000	48	343,456,175	12	90,000,000	3	11,007,900	3	7,800,000	3	4,900,000	3	21,447,400	12	45,135,300	100.00	50.17	00	388,613,475	100.00		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	Bulan	60	330,000,000	48	140,841,000	12	25,000,000	3	3	18,500,000	3	0	3	3,800,000	12	22,300,000	100.00	89.20	00	163,141,000	100.00		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
09.	Pengembangan Riset Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Kali	25	490,000,000	222	2,788,919,000	43	313,922,410	4,240,400	99,075,135	20,897,716	79,334,244	0	203,347,495	0.00	64.84	222	2,992,466,500	403.64							
2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran	Bulan	60	2,732,000,000	48	2,214,027,629	12	562,164,900	3	101,477,000	3	122,521,500	3	104,708,500	3	134,329,533	12	463,036,533	100.00	82.37	00	2,677,004,100	100.00			
01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	60	86,000,000	48	66,468,000	12	16,500,000	3	3,120,000	3	4,692,000	3	3,000,000	3	6,180,000	12	16,392,000	100.00	99.35	00	82,604,000	100.00		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	840,000,000	48	391,549,395	12	30,000,000	3	2,957,000	3	20,029,500	3	2,708,500	3	3,722,000	12	29,417,000	100.00	81.71	00	420,960,395	100.00		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
03.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honorer PPT	Orang	16	1,800,000,000	16	1,756,010,234	17	509,694,300	17	95,400,000	17	98,400,000	17	99,000,000	17	124,427,533	17	417,237,533	100.00	81.86	33	2,173,237,700	206.25		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	75	314,892,500	64.42	-	64.42	117,779,100	64.42	2,154,850	64.42	30,953,300	64.42	150,887,250	85.89	47.93	64	150,887,250	#DIV/0!							
2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	75	314,892,500	64.42	-	64.42	117,779,100	64.42	2,154,850	64.42	30,953,300	64.42	150,887,250	85.89	47.93	64	150,887,250	#DIV/0!							
02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajuk dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional yang apertihara	Unit	10	601,000,000	41	261,237,050	5	104,000,000	0	2	15,030,000	2	21,548,500	20,312,300	2	37,503,750	40.00	36.00	43	298,740,800	430.00					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perengkapan kantor	Bulan	60	234,000,000	48	204,760,000	12	30,000,000	3	3	0	3	0	3	0	12	0	100.00	0.00	00	204,760,000	100.00			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perengkapan kantor	Bulan	60	234,000,000	48	204,760,000	12	30,000,000	3	3	0	3	0	3	0	12	0	100.00	0.00	00	204,760,000	100.00			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PENCAPAIAN	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	Persen	98	2,227,998,000	226,322,500	400,842,823	417,511,050	273,458,599	89.13	1,318,134,972	90.95	59.16	89	1,318,134,972												
2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pencapaian	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	Persen	5	4,175,247,000	98	539,535,000	174,247,500	199,389,491	0	9,628,300	89.13	383,265,291	90.95	71.04	89	383,265,291	1,762.00									
05.	Pelaksanaan Muebareng Kabupaten/Kota	Jumlah penyertenggaran muebareng RKPD	Penyertenggaran	3	4,175,247,000	4	2,500,068,414	1	539,535,000	1	174,247,500	0	199,389,491	1	9,628,300	2	383,265,291	200.00	71.04	0	2,883,931,705	120.00				Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pencapaian	Jumlah perbup RKPD dan RKPD kecamatan	Perbup	10	1,603,718,000	2	947,121,000	32,795,000	20,110,000	2	296,169,800	250,856,699	2	599,931,499	100.00	63.34	2	599,931,499	100.00	63.34	10	1,507,883,873	100.00			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
07.	Koordinasi Penyusunan dan Pemetaan Dokumen	Jumlah perbup RKPD dan RKPD kecamatan	Perbup	10	1,603,718,000	8	907,954,374	2	947,121,000	0	20,110,000	250,856,699	2	599,931,499	100.00	63.34	10	1,507,883,873	100.00	63.34	10	1,507,883,873	100.00			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Keterlambatan Data Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Persen	50	2,361,138,000	50	299,942,000	-	80	11,192,000	80	56,350,000	80	-	80	67,542,000	160.00	22.52	80	67,542,000	100.00						
01.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Pembangunan Daerah	Data pemantauan daerah	Jenis	25	2,361,138,000	20	1,827,479,483	0	299,942,000	0	0	11,192,000	0	0	0	67,542,000	100.00	22.52	20	1,895,021,483	104.00					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

# Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Sasaran	Target Renstra PD pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2020		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12+8+9+10+11		13+12+7+10		14+6+12		15+14+5+10			
2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	Persen	30	3.284.242,000	30	441.400,000	19.280,000	170.151.332	64.991.250	12.973.600	89.13	267.396.182	297.10	60.58	89	267.396.182	297.10									
03.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan	Laporan	10	3.291.242,000	9	441.400,000	19.280,000	170.151.332	64.991.250	12.973.600	7	267.396.182	77.98	60.58	7	267.396.182	70.00								Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
03.	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	Persen		#REF!	#REF!	98	1.621.782,540	30.957,945	167.301.600	63.388,800	11.440,400	89.13	273.088,745	90.95	26.73	89	#REF!	#DIV/0!								
2.01.	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)	Persen	98	1.900,000,000	82.88	698,410,477	98	97,485,000	0	0	0	89.13	-	90.95	0.00	172	698,410,477	175.32								
01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RPJRD)	Jumlah desa yang disinkronisasikan dokumen RPJMD dan RPJRD	Desa	70	1,900,000,000	254	698,410,477	70	97,485,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	254	698,410,477	302.88							Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.01.	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD bidang Sosial budaya	Persen	88	2.700,000,000	100	1.736,030,274	88	512,026,000	0	26,557,945	89,055,400	47,388,800	3,260,400	82.01	166,262,545	93.88	32.47	183	1,902,292,819	207.51						
05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RPJRD)	Persentase capaian Target indikator SDG's	Persen	40	1,250,000,000	31.82	271,309,539	40	128,402,000	0	22,157,940	0	65,275,800	4,048,000	49.53	0	50	91,481,745	123.88	71.21	81	302,811,304	203.43			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
06.	Adaptasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah batasan kabupaten/kota sehat yang sehat	Tatanan	0	1,450,000,000	18	1,404,600,713	0	171,977,000	0	4,400,000	0	17,556,800	40,340,800	0	3,200,400	0	65,558,000	100.00	38.12	24	1,230,218,713	400.00			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah laporan LPJMD	Laporan	3	1,100,000,000	3	251,403,720	1	211,587,000	0	0	6,222,800	3,000,000	0	0	0	9,222,800	0.00	4.30	3	200,626,520	60.00			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
2.02.	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD bidang ekonomi	Persen	96	5,000,000,000	177	1,495,875,500	96	242,153,000	0	4,400,000	0	41,787,200	16,000,000	0	62,187,200	0.00	25.68	177	1,558,062,700	184.38						
01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RPJRD)	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	Koordinasi	90	1,900,000,000	148	798,012,600	8	126,296,000	3	4,400,000	2	16,074,200	16,000,000	2	18,469,600	7	54,943,800	87.30	43.50	153	851,956,400	172.22			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
02.	Adaptasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Jumlah produk unggulan daerah (PUD)	PUD	3	1,750,000,000	3	588,019,040	1	82,594,000	0	0	25,713,000	0	1	0	1	25,713,000	100.00	31.15	4	614,332,040	80.00			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah dokumen RAD-PG	Dokumen	4	1,350,000,000	2	108,243,800	1	31,323,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	108,243,800	50.00			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
2.03.	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Persen	96	3,350,000,000	92.21	1,419,642,660	96	170,118,540	0	0	36,458,000	0	8,180,000	95.77	44,639,000	106.41	26.24	188	1,464,281,660	195.61						
01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RPJRD)	Jumlah desa yang terlembaga	Desa	47	1,500,000,000	48	899,009,070	3	85,800,000	0	0	27,471,600	0	5	8,180,000	5	35,651,600	100.00	41.50	51	935,320,670	188.51			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi	Koordinasi	113	1,850,000,000	58	518,973,580	28	46,700,000	4	0	0	8	0	8	0	26	-	130.00	0.00	84	519,973,580	73.00			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD)	Jumlah koordinasi	Koordinasi					25	37,818,540	0	1	8,987,400	0	1	8,987,400	4.00	23.89	1	8,987,400	#DIV/0!					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
02.	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan	Penelitian	3	432,300,000	3	432,300,000	3	432,300,000	3	0	51,000,000	0	0	3	51,000,000	100.00	12.08	3	51,000,000	#DIV/0!						
2.03.	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan	Penelitian	3	164,400,000	6	164,400,000	0	0	0	0	0	0	0	3	0	100.00	0.00	9	#VALUE!	300.00						
01.	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Penelitian	Penelitian			42,865,000	1	84,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	42,865,000	#DIV/0!					Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Penelitian	Penelitian					100,000,000													#DIV/0!						
2.03.	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan	Penelitian	3	1,050,000,000	6	246,208,800	3	257,900,000	0	0	51,000,000	0	0	0	51,000,000	0.00	19.78	6	297,208,800	200.00						
02.	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Laporan	4	1,050,000,000	3	246,208,800	1	257,900,000	0	0	51,000,000	0	1	51,000,000	100.00	19.78	4	297,208,800	100.00						Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2021 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 12 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2021, semuanya telah tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan perencanaan pembangunan dan urusan Penelitian dan Pengembangan tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Tahun 2021**

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Kinerja Akhir Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-4 (2020)			Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-5 (2021)		
					Target Kinerja Renja tahun 2020	Realisasi Kinerja Renja tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020 (%)	Target Kinerja Renja tahun 2021	Realisasi Kinerja Renja tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 (%)
Program pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	12	60	12	12	100	12	12	100
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%	60	75	70	64,42	92,03	75	64,42	92,03
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	Predikat/ Nilai	BB/75	A/80	BB/79	A/85,96	100	A/80	A/88,27	110.34

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Kinerja Akhir Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-4 (2020)			Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-5 (2021)		
					Target Kinerja Renja tahun 2020	Realisasi Kinerja Renja tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020 (%)	Target Kinerja Renja tahun 2021	Realisasi Kinerja Renja tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 (%)
Program pengembangan data/informasi	Persentase tingkat keterisian data dalam system informasi pembangunan daerah	%	25	50	45	65	100	50	80	160
Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Jumlah Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	Penelitian	1	3	3	3	100	3	3	100
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen RKPd yang ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	1	5	2	2	100	2	2	100

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Kinerja Akhir Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-4 (2020)			Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-5 (2021)		
					Target Kinerja Renja tahun 2020	Realisasi Kinerja Renja tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020 (%)	Target Kinerja Renja tahun 2021	Realisasi Kinerja Renja tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 (%)
	Ketersediaan Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	100	Ada	Ada	100
	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD (%)	%	90	98	82	82,88	101,07	98	89,13	90,95
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Ekonomi	%	89,29	96	82	77,33	94,30	96	95,77	99,76
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Sosial Budaya	%	72	88	84	83,81	99,77	88	82,61	93,88

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Kinerja Akhir Renstra (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-4 (2020)			Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-5 (2021)		
					Target Kinerja Renja tahun 2020	Realisasi Kinerja Renja tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020 (%)	Target Kinerja Renja tahun 2021	Realisasi Kinerja Renja tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021 (%)
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Konsistensi penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	%	89,29	96	95	92,21	97,06	96	95,77	99,76
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	%	0	30	25	47,83	191,32	30	89,13	297,10

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :
  - 1) Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan daerah
  - 2) Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan perencanaan pembangunan
  - 3) Masih kurangnya fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi, kerjasama di bidang perekonomian dan sosial budaya, di bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup, dan di bidang pemerintahan
  - 4) Masih lemahnya integrasi data antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah
  - 5) Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah
  - 6) Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.

- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :
- 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki tantangan untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu strategis di Kabupaten Natuna, meliputi :
    - a. Kualitas Pembangunan Manusia belum optimal
    - b. Kesetaraan dan Keadilan Gender masih rendah
    - c. Pemerataan dan Mutu Pendidikan masih rendah
    - d. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal
    - e. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur belum memadai
    - f. Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal
    - g. Pengembangan Kemaritiman dan pariwisata belum optimal
    - h. Konektivitas Antar Pulau atau Kecamatan
    - i. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi
    - j. Peningkatan pendapatan masyarakat
    - k. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
    - l. Menciptakan lapangan kerja baru atau tenaga kerja terampil
  - 2) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan semakin meningkat, menjadi tantangan untuk terus memperbaiki proses dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mendorong perangkat daerah untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.
  - 3) Perkembangan peraturan dan kebijakan pembangunan nasional yang berubah-ubah menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergitas pembangunan.
  - 4) Perubahan dinamika di tingkat nasional dan dunia yang terus berubah menuntut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk menyusun dokumen perencanaan Kabupaten Natuna yang komprehensif dan mampu mengantisipasi perkembangan dinamika di tingkat nasional dan global.
- a. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:
- 1) Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen perencanaan yang baik.

- 2) Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam perencanaan.
- 3) Banyaknya bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur perencana.
- 4) Banyaknya lembaga penelitian atau penyedia jasa yang dapat membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara baik, sehingga dihasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat daerah maupun nasional.

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan perangkat daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah.
- b) Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan di seluruh bidang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2023, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan RPJMN 2020 - 2024, Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005 – 2025. RPJMN 2020 – 2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang diwujudkan ke dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan ;  
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
  - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah,
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan Karakter Bangsa;

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkuat ketahanan budaya bangsa;
  - 2) Memajukan kebudayaan;
  - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
  - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga dan
  - 5) Meningkatkan budaya literasi
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
  - 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
  - 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien dan
  - 5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
  - 3) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :
- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
  - 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,

- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi dan
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2023, antara lain meliputi:

- a. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Hal Kesehatan dan Pendidikan
- c. Penanggulangan Pengangguran Yang Disertai Decent Job
- d. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
- e. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan Dalam Rangka
- f. Mendorong Produktivitas Ekonomi Hijau

Rencana Kerja Pemerintah 2023 memiliki tema pembangunan: “Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan tersebut mendukung pelaksanaan prioritas nasional (PN). Tujuh PN tahun 2023 yang merupakan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Arah Kebijakan pembangunan nasional tahun 2023, meliputi:

- a. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
- b. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
- c. Mendorong pemulihan dunia usaha
- d. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- e. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
- f. Percepatan Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
- g. pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
- h. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pada tahun 2023 fokus pembangunan Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada akselerasi untuk meningkatkan ekonomi yang sudah pulih kembali. Dalam melaksanakan fokus pembangunan dan target pembangunan tahun 2023, ditetapkan **prioritas pembangunan** Provinsi Kepulauan Riau untuk RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Optimalisasi potensi perekonomian daerah.
- b. Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
- c. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.

Pada tahun 2023 fokus pembangunan Kabupaten Natuna berdasarkan isu strategis daerah, yaitu:

1. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter budaya melayu
2. Penanganan pandemi akibat covid-19
3. Kemandirian masyarakat ekonomi berbasis masyarakat, terutama di sektor kemaritiman dan pariwisata
4. Akselerasi pembangunan wilayah Natuna sebagai kawasan strategis perbatasan nasional
5. Peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi komunikasi
7. Penurunan kualitas lingkungan hidup
8. Implementasi Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik)

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2023 dan mendasarkan hasil perumusan isu strategis diatas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada Tahun 2023 yaitu: **Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Penguatan Infrastruktur dan Percepatan Peningkatan Ekonomi.**

Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Natuna tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan ekonomi daerah
2. Pembangunan infrastruktur wilayah
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian prioritas pembangunan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan. Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output.

Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.

Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah Meningkatnya pelayanan publik yang prima Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Perencanaan Pembangunan.

Tabel tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja**  
**Tahun 2023**

<b>MISI 6 : “Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (<i>smart bureaucracy</i>).”</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LAKIP
	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan
		Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2023**  
**Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Sasaran 2023	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2023
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Lakip	Nilai	79,50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	88.35
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	7,5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Persen	84
						Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Persen	64
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD Yang diakomodir Dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	93

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Sasaran 2023	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2023
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD Yang diakomodir Dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumberdaya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	93
	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,8255	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	55,00
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan						Persen	25	
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	Persen	85

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan**

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

- a. Mengarah pada perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026,
- b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2023 tertuang dalam Lampiran I (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024).

#### **4.2 Cascading dan Crosscutting**

Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur sejauhmana perencanaan Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Cascading Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Lampiran II (Cascading Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023)**, sedangkan Crosscutting Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023 menggambarkan pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh factor-faktor yang beririsan secara horizontal tidak selalu secara vertical (secara hirarki structural) sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh. Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada **Lampiran III (Cross Cutting Kinerja Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023)**.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pjabat struktural di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2023 sebaik-baiknya sehingga dapat bertanggung dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2023 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan subkegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2023.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan program, kegiatan sub kegiatan Renja tahun 2023 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Badan dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 guna memastikan pelaksanaan program, kegiatan sub kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Penelitian dan Pengembangan.

Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2023 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Ranai, Juli 2022

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah  
Kabupaten Natuna



**MOESTOFA ALBAKRY, SE**  
NIP. 19731030 200012 1 003

**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
KABUPATEN NATUNA**

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								11,516,607,000	11,281,607,000	
5.01.	PERENCANAAN								10,591,607,000	10,356,607,000	
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		NILAI LAPORAN LKJIP	88.35 Nilai			180,000,000	180,000,000	
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	70 Persen	180,000,000	180,000,000	
5.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	120,000,000	120,000,000	
	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kabupaten Natuna				2 Dokumen	120,000,000	120,000,000	
5.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	60,000,000	60,000,000	
	Laporan LAKIP, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan			Kabupaten Natuna				3 Laporan	60,000,000	60,000,000	
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85 Persen			6,866,607,000	6,871,607,000	
5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	4,552,231,000	4,752,231,000	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	4,552,231,000	4,752,231,000	
	Penerima Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Natuna				58 Orang/bulan	4,552,231,000	4,752,231,000	
5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95 Persen	180,000,000	185,000,000	
5.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60,000,000	65,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kabupaten Natuna				1 Paket	60,000,000	65,000,000	
5.01.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	60,000,000	60,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pegawai			Kabupaten Natuna				6 Orang	60,000,000	60,000,000	
5.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	60,000,000	60,000,000	
	Bimbingan Teknis Aparatur			Kabupaten Natuna				4 Orang	60,000,000	60,000,000	
5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	82 Persen	431,376,000	431,376,000	
5.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	80,000,000	80,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Natuna				12 Paket	80,000,000	80,000,000	
5.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8,000,000	8,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor			Kabupaten Natuna				12 Paket	8,000,000	8,000,000	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12,000,000	12,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Natuna				12 Paket	12,000,000	12,000,000	
5.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30,000,000	30,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Natuna				12 Paket	30,000,000	30,000,000	
5.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,000,000	5,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kabupaten Natuna				12 Dokumen	5,000,000	5,000,000	
5.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5,000,000	5,000,000	
	Penyediaan Bahan/Material			Kabupaten Natuna				1 Paket	5,000,000	5,000,000	
5.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93 Laporan	284,176,000	284,176,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Natuna				93 Laporan	284,176,000	284,176,000	
5.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40 Dokumen	7,200,000	7,200,000	
	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Kantor			Kabupaten Natuna				40 Dokumen	7,200,000	7,200,000	
5.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75 Persen	804,000,000	804,000,000	
5.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	50,000,000	50,000,000	
	Pengadaan Kursi Kerja			Kabupaten Natuna				5 Unit	10,000,000	10,000,000	
	Pengadaan Kursi Kerja Pejabat			Kabupaten Natuna				4 Unit	12,000,000	12,000,000	
	Pengadaan Lemari Arsip Kayu			Kabupaten Natuna				1 Unit	8,000,000	8,000,000	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PACU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Meja Kerja			Kabupaten Natuna				5 Unit	20,000,000	20,000,000	
5.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	103 Unit	754,000,000	754,000,000	
	Pengadaan AC Split 2 PK			Kabupaten Natuna				3 Unit	12,000,000	12,000,000	
	Pengadaan Digital Display Standing			Kabupaten Natuna				4 Unit	20,000,000	20,000,000	
	Pengadaan Drone			Kabupaten Natuna				1 Unit	25,000,000	25,000,000	
	Pengadaan Filling Besi Metal			Kabupaten Natuna				2 Unit	12,000,000	12,000,000	
	Pengadaan Handy cam			Kabupaten Natuna				1 Unit	10,000,000	10,000,000	
	Pengadaan Hardisk 1 Tera			Kabupaten Natuna				3 Unit	4,500,000	4,500,000	
	Pengadaan Kamera CCTV			Kabupaten Natuna				8 Unit	12,000,000	12,000,000	
	Pengadaan Kamera Zoom Meeting			Kabupaten Natuna				7 Unit	14,000,000	14,000,000	
	Pengadaan Komputer PC 32 Inci			Kabupaten Natuna				7 Unit	70,000,000	70,000,000	
	Pengadaan Laptop/ Note Book			Kabupaten Natuna				11 Unit	220,000,000	220,000,000	
	Pengadaan Lemari Es			Kabupaten Natuna				3 Unit	12,000,000	12,000,000	
	Pengadaan Mesin Bor Listrik			Kabupaten Natuna				1 Unit	2,000,000	2,000,000	
	Pengadaan Mesin Pembersih Lantai			Kabupaten Natuna				2 Unit	10,000,000	10,000,000	
	Pengadaan Mesin Penghancur Kertas			Kabupaten Natuna				6 Unit	12,000,000	12,000,000	
	Pengadaan Mesin Pempa Air			Kabupaten Natuna				1 Unit	4,000,000	4,000,000	
	Pengadaan Printer			Kabupaten Natuna				6 Unit	24,000,000	24,000,000	
	Pengadaan Printer A3			Kabupaten Natuna				2 Unit	14,000,000	14,000,000	
	Pengadaan Proyektor			Kabupaten Natuna				6 Unit	90,000,000	90,000,000	
	Pengadaan Radio HT			Kabupaten Natuna				17 Unit	8,500,000	8,500,000	
	Pengadaan Sound System			Kabupaten Natuna				3 Unit	45,000,000	45,000,000	
	Pengadaan Sound System Portable			Kabupaten Natuna				1 Unit	7,000,000	7,000,000	
	Pengadaan Televisi 62 Inchi			Kabupaten Natuna				6 Unit	120,000,000	120,000,000	
	Pengadaan Treepotd			Kabupaten Natuna				2 Unit	6,000,000	6,000,000	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100 Persen	474,000,000	474,000,000	
5.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6,000,000	6,000,000	
	Penyediaan Laporan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Natuna				12 Laporan	6,000,000	6,000,000	
5.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18,000,000	18,000,000	
	Penyediaan Laporan Tagihan Air			Kabupaten Natuna				12 Laporan	18,000,000	18,000,000	
5.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	450,000,000	450,000,000	
	Penyediaan Laporan Pembayaran Gaji Tenaga Honorar/ PTT			Kabupaten Natuna				12 Laporan	450,000,000	450,000,000	
5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	82 Persen	225,000,000	225,000,000	
5.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	60,000,000	60,000,000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kabupaten Natuna				4 Unit	60,000,000	60,000,000	
5.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	30,000,000	30,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Natuna				5 Unit	30,000,000	30,000,000	
5.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80,000,000	80,000,000	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kabupaten Natuna				1 Unit	80,000,000	80,000,000	
5.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	50,000,000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Bunguran Timur				1 Unit	50,000,000	50,000,000	
5.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	5,000,000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Natuna				1 Unit	5,000,000	5,000,000	
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM ROKPD	84 Persen			1,020,000,000	1,180,000,000	
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di ROKPD	69 Persen	900,000,000	1,030,000,000	
5.01.02.2.01.03.	Pelaksanaan Konsultasi Publik						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	120,000,000	120,000,000	
	Berita Acara Konsultasi Publik			Kabupaten Natuna				1 Berita Acara	120,000,000	120,000,000	
5.01.02.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	110,000,000	110,000,000	
	Berita Acara Forum SKPD			kabupaten Natuna				2 Berita Acara	110,000,000	110,000,000	
5.01.02.2.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	480,000,000	580,000,000	
	Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			Kabupaten Natuna				1 Berita Acara	480,000,000	580,000,000	
5.01.02.2.01.06.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	700 Usulan	70,000,000	70,000,000	
	Usulan yang terverifikasi kecamatan			Kabupaten Natuna				700 Usulan	70,000,000	70,000,000	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROC & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.01.02.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	120,000,000	150,000,000	
	Dokumen RKPD dan RKPDP Perubahan			Kabupaten Natuna				2 Dokumen	120,000,000	150,000,000	
5.01.02.2.04.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						Jumlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Sistem	120,000,000	150,000,000	
5.01.02.2.04.02.	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	4 Dokumen	120,000,000	150,000,000	
	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			Kabupaten Natuna				4 Dokumen	120,000,000	150,000,000	
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE REKOMENDASI HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIAKOMODIR	64 Persen			680,000,000	680,000,000	
5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	90 Persen	400,000,000	400,000,000	
5.01.02.2.02.01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Masukan	300,000,000	300,000,000	
	Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			Kabupaten Natuna				3 Masukan	300,000,000	300,000,000	
5.01.02.2.02.03.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	100,000,000	100,000,000	
	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan			Kabupaten Natuna				1 Buku	100,000,000	100,000,000	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PACU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						Persentase tindakan lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	60 Persen	280,000,000	280,000,000	
5.01.02.2.03.03.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	280,000,000	280,000,000	
	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			Kabupaten Natuna				4 Laporan	280,000,000	280,000,000	
5.01.03.	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPd BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	93 Persen			800,000,000	800,000,000	
5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						Persentase Program RKPd yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	93 Persen	800,000,000	800,000,000	
5.01.03.2.01.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	8 Dokumen	100,000,000	100,000,000	
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			Kabupaten Natuna				8 Dokumen	100,000,000	100,000,000	
5.01.03.2.01.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Kabupaten Natuna				8 Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PRGG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.01.03.2.01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan	100,000,000	100,000,000	
	Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan			Kabupaten Natuna				8 Laporan	100,000,000	100,000,000	
5.01.03.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	
	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			Kabupaten Natuna				1 Laporan	100,000,000	100,000,000	
5.01.03.2.01.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	100,000,000	100,000,000	
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Kabupaten Natuna				8 Dokumen	100,000,000	100,000,000	
5.01.03.2.01.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000	
	Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			Kabupaten Natuna				8 Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000	
5.01.03.2.01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000	
	Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia			Kabupaten Natuna				8 Perangkat Daerah	100,000,000	100,000,000	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.01.03.2.01.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	
	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			Kabupaten Natuna				1 Laporan	100,000,000	100,000,000	
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN/ PEMBANGUNAN DAERAH	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RKPD BIDANG PEREKONOMIAN SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	93 Person			1,245,000,000	645,000,000	
5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	93 Person	600,000,000	75,000,000	
5.01.03.2.02.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	75,000,000	75,000,000	
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			Kabupaten Natuna				5 Dokumen	75,000,000	75,000,000	
5.01.03.2.02.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	75,000,000	0	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan (RKPD)			Kabupaten Natuna				5 Perangkat Daerah	75,000,000	0	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JEMIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.01.03.2.02.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	75,000,000	0	
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan			Kabupaten Natuna				5 Perangkat Daerah	75,000,000	0	
5.01.03.2.02.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	75,000,000	0	
	Sinkronisasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Pusat, Propinsi dan Kabupaten serta lainnya)			Kabupaten Natuna				1 Laporan	75,000,000	0	
5.01.03.2.02.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	75,000,000	0	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (RKPD)			Kabupaten Natuna				5 Dokumen	75,000,000	0	
5.01.03.2.02.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Perangkat Daerah	75,000,000	0	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan (RKPD)			Kabupaten Natuna				5 Perangkat Daerah	75,000,000	0	
5.01.03.2.02.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Perangkat Daerah	75,000,000	0	
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan			Kabupaten Natuna				5 Perangkat Daerah	75,000,000	0	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.01.03.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	75,000,000	0	
	Sinkronisasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Pusat, Propinsi dan Kabupaten serta lainnya)			Kabupaten Natuna				1 Laporan	75,000,000	0	
5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						Persentase Program RKPd yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	93 Persen	645,000,000	570,000,000	
5.01.03.2.03.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	3 Dokumen	75,000,000	75,000,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan (RKPd)			Kabupaten Natuna				3 Dokumen	75,000,000	75,000,000	
5.01.03.2.03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	75,000,000	75,000,000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan (RKPd)			Kabupaten Natuna				3 Perangkat Daerah	75,000,000	75,000,000	
5.01.03.2.03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	75,000,000	0	
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan			Kabupaten Natuna				5 Perangkat Daerah	75,000,000	0	
5.01.03.2.03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	75,000,000	75,000,000	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAOU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEO
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sinkronisasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Pusat, Propinsi dan Kabupaten serta Lainnya)			Kabupaten Natuna				1 Laporan	75,000,000	75,000,000	
5.01.03.2.03.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan			Kabupaten Natuna				1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	
5.01.03.2.03.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Perangkat Daerah	75,000,000	75,000,000	
	Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan			Kabupaten Natuna				1 Perangkat Daerah	75,000,000	75,000,000	
5.01.03.2.03.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	1 Perangkat Daerah	75,000,000	75,000,000	
	Monitoring dan Evaluasi			Kabupaten Natuna				1 Perangkat Daerah	75,000,000	75,000,000	
5.01.03.2.03.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	120,000,000	120,000,000	
	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Kabupaten Natuna				1 Laporan	120,000,000	120,000,000	
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								925,000,000	925,000,000	
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS INOVASI DAERAH	55.00 Nilai			400,000,000	400,000,000	
5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100 Persen	400,000,000	400,000,000	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.02.2.04.01.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	
	Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Kabupaten Natuna				1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	
5.05.02.2.04.03.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	250,000,000	250,000,000	
	Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			Kabupaten Natuna				1 Laporan	250,000,000	250,000,000	
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA KELITBANGAN	25 Persen			525,000,000	525,000,000	
5.05.02.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	100 Persen	75,000,000	75,000,000	
5.05.02.2.01.01.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	
	Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah			Kabupaten Natuna				1 Laporan	25,000,000	25,000,000	
5.05.02.2.01.12.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	
	Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik			Kabupaten Natuna				1 Laporan	50,000,000	50,000,000	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.02.2.02.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen	150,000,000	150,000,000	
5.05.02.2.02.03.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	
	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			Kabupaten Natuna				1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	
5.05.02.2.02.05.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	
	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			Kabupaten Natuna				1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	
5.05.02.2.02.09.	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	
	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja			Kabupaten Natuna				1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	
5.05.02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	300,000,000	300,000,000	
5.05.02.2.03.01.	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	
	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			Kabupaten Natuna				1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	
5.05.02.2.03.02.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	
	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			Kabupaten Natuna				1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	

PERANGKAT DAERAH : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAQU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT				
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.05.02.2.03.04.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	
	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			Kabupaten Natuna				1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	
5.05.02.2.03.13.	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	
	Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika			Kabupaten Natuna				1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	
JUMLAH									11,516,607,000	11,281,607,000	

Ranai, 23 Agustus 2022

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan  
Daerah



MOESTOFA ALBAKRY, SE

NIP. 19731030 200012 1 003

- MIS/SASARAN INDIKATOR RUMAH
- SASARAN INDIKATOR KENSTRA
- PROGRAM INDIKATOR
- KEGIATAN INDIKATOR
- SUB KEGIATAN INDIKATOR

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2023**

MENCiptakan REFORMASI Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)

MENingkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel  
INDEKS KEMERDEKAAN BIROKRASI 63,90 NILAI

MENingkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel  
INDEKS KEMERDEKAAN KEPALA DAERAH 62 INDEKS

MENingkatkan PELAKSANAAN INOVASI DALAM PENGKAITAN DANA BANG DAERAH  
INDEKS DANA BANG DAERAH 2,8235 NILAI

MENingkatkan KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
INDEKS KUALITAS PERENCANAAN 73,5 NILAI

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
INDEKS INOVASI DAERAH 55,00 NILAI

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PERSENTASE IMPLEMENtASI RENCANA KETRANSPIRAN 25 PERSEN

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  
PERSENTASE PROGRAM RENCANA YANG TERAKHIR DI DALAM RANGKAI 64 PERSEN

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  
PERSENTASE PROGRAM RENCANA YANG TERAKHIR DI DALAM RANGKAI 64 PERSEN

PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PERSENTASE PROGRAM RENCANA YANG TERAKHIR DI DALAM RANGKAI 93 PERSEN

PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PERSENTASE PROGRAM RENCANA YANG TERAKHIR DI DALAM RANGKAI 93 PERSEN

PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI  
PERSENTASE PERENCANAAN INOVASI DAERAH 100 PERSEN

RESEARCH DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELANGKARAN PERENCANAAN DAN KEMERDEKAAN PERALIHAN  
PERSENTASE PERENCANAAN HASIL KEGIATAN BIDANG PERENCANAAN 100 PERSEN

RESEARCH DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEMERDEKAAN  
PERSENTASE PERENCANAAN HASIL KEGIATAN BIDANG SOSIAL DAN KEMERDEKAAN 100 PERSEN

RESEARCH DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN KEMERDEKAAN  
PERSENTASE PERENCANAAN HASIL KEGIATAN BIDANG EKONOMI DAN KEMERDEKAAN 100 PERSEN

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENCANAAN  
PERSENTASE USULAN PERENCANAAN YANG DIKORPORASIKAN 69 PERSEN

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH  
JUMLAH SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH 1 SISTEM

ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH  
PERSENTASE TINGKAT KEAKURATAN DATA DAERAH 90 PERSEN

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PERSENTASE TINGKAT AKURASI HASIL AKTORING DAN EVALUASI PERENCANAAN DAERAH 60 PERSEN

KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANDARA  
PERSENTASE PROGRAM RENCANA YANG TERAKHIR DI DALAM RANGKAI 93 PERSEN

KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SIKERDEKAAN ALAM  
PERSENTASE PROGRAM RENCANA YANG TERAKHIR DI DALAM RANGKAI 93 PERSEN

UJI COBA DAN PENERAPAN BANGKAI BANGKAI BERKAITAN DENGAN INOVASI DI BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN KEMERDEKAAN TEKNOLOGI  
JUMLAH LAPORAN HASIL PELAKSANAAN UJI COBA DAN PENERAPAN BANGKAI BERKAITAN DENGAN INOVASI DI BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN KEMERDEKAAN TEKNOLOGI 0 LAPORAN

FASILITASI PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG USARA MALLI DEEA  
JUMLAH LAPORAN HASIL PELAKSANAAN FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG USARA MALLI DEEA 0 LAPORAN

RESEARCH DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEMERDEKAAN  
JUMLAH DOKUMEN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEMERDEKAAN 1 DOKUMEN

RESEARCH DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USARA KECIL DAN MENENGAH  
JUMLAH DOKUMEN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USARA KECIL DAN MENENGAH 1 DOKUMEN

PELAKSANAAN KONSULTASI PIRILIK  
JUMLAH BERTAKARAKA KONSULTASI KURILIK 1 BERTAKARAKA

DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH YANG BERBASIS INOVATIF  
JUMLAH LAPORAN HASIL PELAKSANAAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH YANG BERBASIS INOVATIF 1 LAPORAN

REKOMENDASI BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PERENCANAAN  
JUMLAH REKOMENDASI BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PERENCANAAN 0 REKOMENDASI

RESEARCH DAN PENGEMBANGAN PARHISADA  
JUMLAH DOKUMEN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARHISADA 1 DOKUMEN

RESEARCH DAN PENGEMBANGAN BADAN USARA MALLI DEEA  
JUMLAH DOKUMEN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN USARA MALLI DEEA 0 DOKUMEN

PELAKSANAAN MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA  
JUMLAH BERTAKARAKA MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA 1 BERTAKARAKA

RESEARCH DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA  
JUMLAH DOKUMEN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA 1 DOKUMEN

RESEARCH DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
JUMLAH DOKUMEN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 DOKUMEN

RESEARCH DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA  
JUMLAH DOKUMEN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA 1 DOKUMEN

RESEARCH DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
JUMLAH DOKUMEN HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 DOKUMEN

PELAKSANAAN MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA  
JUMLAH BERTAKARAKA MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA 1 BERTAKARAKA

PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
JUMLAH BUKU PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH YANG TERSEBUT 1 BUKU

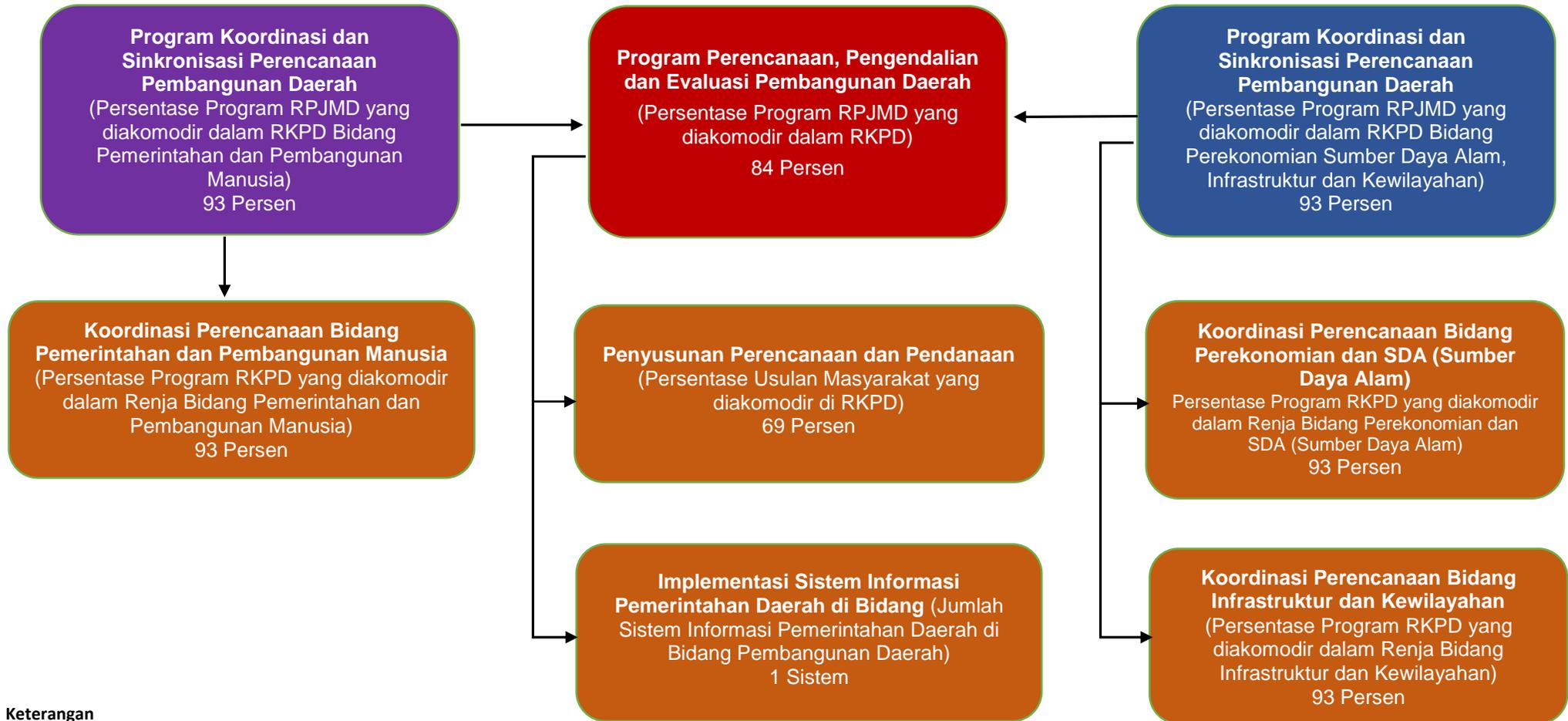
PELAKSANAAN MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA  
JUMLAH BERTAKARAKA MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA 1 BERTAKARAKA

PELAKSANAAN MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA  
JUMLAH BERTAKARAKA MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA 1 BERTAKARAKA

KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TERSEBUT 0 DOKUMEN



## Cross Cutting Kinerja Program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2023



### Keterangan

- : Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah
- : Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- : Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
- : Kegiatan